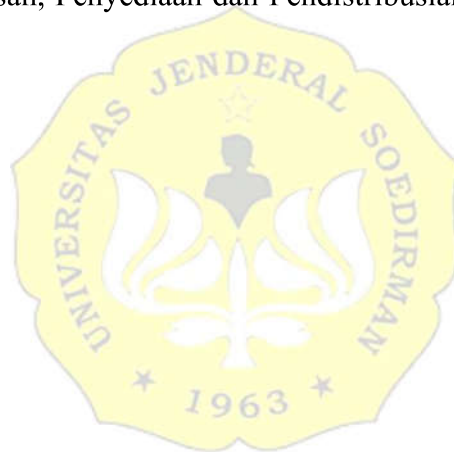


RINGKASAN

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Penyalahgunaan bahan bakar minyak masih terjadi meskipun adanya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Langkah-langkah pengawasan yang telah diterapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan di sektor ini mungkin masih kurang optimal. Tantangan masih ada, dan orang-orang mungkin terus mencoba melanggar undang-undang atau terlibat dalam praktik ilegal seperti penyelundupan bahan bakar minyak, peredaran bahan bakar minyak palsu, atau pencurian bahan bakar minyak. Melihat fenomena yang terjadi terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak maka pemerintah harus terus bekerjasama dalam meningkatkan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Dalam rangka mengatasi latar belakang masalah tersebut, diperlukan upaya yang lebih baik dalam pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum terkait dengan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Selain itu, pendekatan yang berkelanjutan dan berfokus pada efisiensi energi serta pengembangan sumber energi alternatif juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan meminimalkan dampak negatif yang terkait dengan ketidakmaksimalan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Proses Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak oleh BPH Migas dapat dilihat dari empat langkah pengawasan menurut Wijayanti, yaitu : Penetapan Standar Pengawasan yang dinilai dari peran dan tanggung jawab BPH Migas dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan standar pengawasan yang ada dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Pengukuran Penampilan Pelaksana Pengawasan yang dinilai dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Perbandingan Hasil Pengawasan Dengan Standar Pengawasan yang dinilai dari Laporan Hasil Pengawasan dan Tanggapan/Analisis Pimpinan BPH Migas dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut. Pengambilan Tindakan-Tindakan Perbaikan yang dinilai dari tindakan perbaikan dan inovasi yang dilakukan BPH Migas dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa BPH Migas telah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan standar pengawasan dengan sistem digitalisasi nozzle, form uji petik lapangan, dan verifikasi volume penyaluran bahan bakar minyak oleh badan usaha penugasan. Selanjutnya, BPH Migas dalam

melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak masih belum memiliki jumlah pelaksana pengawasan yang ideal untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia, namun dengan pelaksana pengawasan yang ada BPH Migas tetap mampu memberikan kinerja yang cukup baik dalam mengungkap atau mencegah dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak. Kemudian, BPH Migas sudah memiliki beberapa bentuk laporan hasil pengawasan yang akan dianalisis oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti yaitu form uji petik lapangan, sistem digitalisasi nozzle, dan nota dinas untuk permohonan tindak lanjut pengawasan yang disertai dengan lampiran hasil pengawasan. Terakhir, BPH Migas terus melakukan tindakan-tindakan perbaikan dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dengan memperbaiki proses tata cara pelaksanaan pengawasan, penyempurnaan ketentuan peraturan di bidang pengawasan, dan juga melakukan inovasi dengan cara menginisiasi pengidentifikasian nomor polisi kendaraan yang terkait dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan menginisiasi pemantauan CCTV dengan akses *cloud/mirroring*.

Kata Kunci : Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian, Bahan Bakar Minyak, BPH Migas



SUMMARY

The Downstream Oil and Gas Regulatory Agency is a body formed to regulate the supervision of the supply and distribution of Fuel Oil and Natural Gas and the Transportation of Natural Gas through pipes in Downstream Business Activities. Fuel abuse still occurs despite the existence of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency, which is responsible for regulating and overseeing the oil and gas industry in Indonesia. Supervisory measures that have been implemented by the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency to prevent violations and fraud in the sector may still be less than optimal. Challenges still exist, and people may continue to try to break the law or engage in illegal practices such as fuel oil smuggling, circulation of counterfeit fuel oil, or fuel oil theft. In order to address the background of the problem, better efforts are needed in supervision, regulation, and law enforcement related to the supply and distribution of fuel oil. In addition, a sustainable approach that focuses on energy efficiency and the development of alternative energy sources can also help reduce dependence on fuel oil and minimize the negative impacts associated with inadequate oversight. This study aims to explain the Supervision System for the Supply and Distribution of Fuel Oil by the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency. This type of research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques is used with observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusion. The results showed that the supervision system for the supply and distribution of fuel oil by BPH Migas can be seen from the four steps of supervision according to Wijayanti, namely: Determination of Supervision Standards which is assessed from the roles and responsibilities of BPH Migas in supervising the supply and distribution of fuel oil and existing supervision standards in supervising the supply and distribution of fuel oil. Measurement of Supervisory Performers which is assessed from the quantity and quality of human resources owned by BPH Migas to supervise and enforce the law on the supply and distribution of fuel oil. Comparison of Supervision Results with Supervision Standards assessed from the Supervision Results Report and Response / Analysis of BPH Migas Leaders in following up on the supervision results report. Taking Corrective Actions assessed from corrective actions and innovations made by BPH Migas in supervising the supply and distribution of fuel oil. This study concludes that BPH Migas has clear roles and responsibilities in supervising the supply and distribution of fuel oil and supervision standards with a nozzle digitization system, field check test forms, and verification of the volume of fuel oil distribution by the assigned business entity. Furthermore, BPH Migas in supervising the supply and distribution of fuel oil still does not have the ideal number of supervisory executors to oversee the supply and distribution of fuel oil in Indonesia, but with the existing supervisory executors BPH Migas is still able to provide a fairly good performance in uncovering or preventing allegations of misuse of fuel oil. Finally, BPH Migas continues to take corrective actions in overseeing the supply and distribution of fuel oil by improving the process of implementing supervision procedures, improving regulatory provisions in the field of supervision, and also innovating by initiating the identification of vehicle police numbers related to fuel oil abuse and initiating CCTV monitoring with cloud/mirroring access.

Keywords : Supervision, Supply and Distribution, Fuel Oil, BPH Migas

